



OPTIMALIZING POLITICAL CAPACITY OF THE PRO-DEMOCRACY ACTORS THROUGH THE FORMING OF WELFARE POLITICAL BLOC

ABSTRACT

The study explores problems and options that are challenged by the actors of pro-democracy movements in Indonesia. Its aim is to seek a well-and-measurable strategies that enabling the actors to continue promote and advance democracy condition. The main analytical tools used in the study is the political capacity of the actors. It is assumed that the development of democracy depends on how the actors actualize their political capacity in dealing with the obstacles and opting for possible alternatives. At the end, the study is expected to contribute to attempts for improving the quality of popular representation.

The study is an integral part of – or embedded to – democratization efforts. Reflections and democratic experiences from the ground have been collected systematically, and the results are transformed into action plans for the coming phase. In short, this is the study on democracy and democratization in the frame of transformative politics.

Formulation of recommendation is based on analysing of characteristics of political capacity of the pro-democracy actors. The study concludes that during the period of 2008-2013, the actors have tendency to become populist. It is characterized by (1) the tendency to inclusive, (2) mobilizing public support through direct contacts to the people, by using (3) strategic issues that engage popular interests, (4) the strengthen of social basis, particularly in developing relation and good connection with political figures and parties, and (5) the tendency of promoting informal rather than formal and political representation.

However, the study discovers there are three groups of actor practising populism in three different ways. The first and majority group is the actors who tend to work individually from and within parties or progressive politicians, using the charisma and popular claims, yet they are not part of the mass. The second smaller group consists of actors who are associate themselves as part and work along with mass organisations, e.g. trade unions, and demand for their interests. The third is a minority group of actors who opt for building network with other equal actors and coordinate organizational based activities.

The findings enhance the previous study conducted by Demos-UiO in 2007 that recommended the form of democratic political bloc to improve the institution of representation. The characteristics of political capacity identified by this study will help the actors to optimize their capacity by creating different roles in their efforts to develop the bloc.

Aside from that, the actors could optimize their political capacity by anticipating the louder public voices demanding welfare state. Such situation enables the actors to avoid sectoral egoism to foster a common platform for the bloc. It is no doubt that to develop a “welfare political bloc” is a strategic instrument in which the actors can optimize their political capacity.

Keywords: pro-democracy actors, political bloc, democracy, democratization, Indonesia, political capacity, welfare, patronage, transformative politics, populism



OPTIMALISASI KAPASITAS POLITIK AKTOR DEMOKRASI MELALUI PENGEMBANGAN BLOK POLITIK KESEJAHTERAAN

ABSTRAK

Studi ini menelaah masalah dan peluang-peluang yang dihadapi para aktor gerakan demokrasi di Indonesia. Penelaahan itu dimaksudkan untuk mencari rumusan aksi yang tepat dan terukur yang dapat dilakukan oleh para aktor untuk mendorong perkembangan dan kemajuan demokrasi. Alat analisis utama yang digunakan untuk mengungkap masalah dan peluang itu adalah kapasitas politik para aktor. Asumsinya, perkembangan demokrasi ditentukan oleh aktualisasi kapasitas politik para aktor dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Tujuan lebih lanjut yang ingin dicapai adalah merumuskan rekomendasi bagi gerakan demokrasi untuk memperbaiki kualitas keterwakilan publik.

Studi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya demokratisasi. Berbagai refleksi dan pengalaman demokrasi di lapangan dikumpulkan secara sistematis, lalu hasil-hasilnya ditransformasikan menjadi rancangan aksi dalam tahap pembangunan demokrasi selanjutnya. Singkatnya, inilah studi tentang demokrasi dan demokratisasi dalam kerangka politik transformatif (*transformative politics*).

Upaya untuk mencari rumusan rekomendasi aksi didasarkan atas analisis terhadap karakteristik kapasitas politik para aktor gerakan demokrasi. Studi ini menyimpulkan para aktor gerakan demokrasi pada periode 2008-2013 secara umum berkarakter populis. Karakter itu ditandai oleh (1) kecenderungan kuat untuk terbuka terhadap keterlibatan banyak orang, (2) menguatnya kapasitas untuk melakukan mobilisasi dukungan publik secara langsung, dengan (3) menggunakan isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan banyak orang, (4) berkembangnya basis kekuatan sosial para aktor, khususnya dalam bentuk relasi dan koneksi dengan tokoh-tokoh politik, serta (5) kecenderungan mereka untuk mendorong partisipasi publik melalui saluran-saluran representasi informal, ketimbang mengarahkannya melalui saluran representasi politik yang bersifat formal.

Namun, ada tiga kelompok aktor yang masing-masing menjalankan populisme dengan cara berbeda. Kelompok pertama adalah kelompok mayoritas yang bekerja secara individual dan bersama partai atau politisi progresif, cenderung menggunakan karisma dan klaim-klaim populer, namun tidak secara langsung berbau dengan massa. Kelompok kedua, jauh lebih kecil proporsinya, adalah mereka yang bekerja sebagai bagian dari dan bersama organisasi-organisasi massa, terutama serikat buruh, dan menyampaikan tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan yang dirasakan langsung oleh mereka. Ketiga, sama kecilnya dengan kelompok kedua, adalah mereka yang memilih untuk membangun jejaring antar-aktor untuk mengkoordinasikan aksi-aksi berbasis organisasi.

Temuan studi ini melengkapi hasil studi Demos-UiO 2007 yang merekomendasikan pembentukan Blok Politik Demokratik (BPD) untuk memperkuat institusi representasi politik. Karakteristik kapasitas politik sebagaimana yang ditemukan oleh studi ini dijadikan sebagai basis bagi pembagian peran para aktor dalam pembentukan blok politik, sehingga setiap aktor dapat lebih optimal memberikan sumbangan mereka berdasarkan karakter kapasitas politik yang mereka miliki.

Selain melalui pembagian peran, optimalisasi kapasitas politik aktor dilakukan juga dengan mengantisipasi menguatnya desakan publik terhadap hadirnya negara kesejahteraan. Situasi itu membuka peluang bagi para aktor untuk lebih cepat membangun *common platform* blok politik tanpa terjebak ke dalam adu-kepentingan sektoral. Itu sebabnya studi ini melihat Blok Politik Kesejahteraan adalah instrumen strategis yang perlu dikembangkan demi mengoptimalkan kapasitas politik para aktor.

Kata kunci: *aktor demokrasi, blok politik, demokrasi, demokratisasi, Indonesia, kapasitas politik, kesejahteraan, patronase, politik transformatif, populisme*